



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS TENAGA KERJA

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025



Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Lamongan
Kode Pos 62214 Telp (0322) 316147
E-mail: disnaker@lamongankab.go.id
Website: www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun, dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini memuat Program dan Kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas ke depan dengan mengantisipasi perkembangan mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Perubahan RENJA Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025.

Sekian dan terima kasih.

Lamongan, 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



[Signature]
M. ZAMRONI, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA	4
BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025	6
2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	24
2.4 PENELAAHAN PERUBAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 TELAAHAN TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	26
3.2 PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN PD TAHUN 2025	28
3.3 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025	31
BAB IV PENUTUP	46
4.1 KESIMPULAN	47
4.2 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	47
4.3 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN	47
4.4 RENCANA TINDAK LANJUT	48

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian, Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan, sehingga berdampak kepada penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik dari sisi proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundangan-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- 1) RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
- 2) RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, kondisi umum yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas

sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun Kabupaten;

- 3) Renstra PD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;
- 4) Perubahan Renja PD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra PD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
- 5) RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja PD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan ideal dari Rencana Kerja PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1).
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Setrategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) berdasarkan ranwal RPJMD 2025-2029 dimaksudkan agar Pola Pembangunan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dapat dijalankan secara sistematis, teratur, terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor-faktor penghambat dan pendukung sehingga dampak yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir dan diantisipasi.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-PD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan.
- 2) Menetapkan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam satu tahun sebagaimana diuraikan dalam RENSTRA PD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yang menjadi Pedoman Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja PD

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
	1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025
	2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025
	3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025
BAB IV	PENUTUP
	KESIMPULAN
	4.1 Kesimpulan
	4.2 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan
	4.3 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
	4.4 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

- **Urusan Ketenagakerjaan**
Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 5 Program, 17 Kegiatan dan Sub Kegiatan 37 dengan total Anggaran pada Tahun 2024 sejumlah Rp 7.419.074.768,- terealisasi Rp 6.655.584.351,- (89,71%) belum terserap Rp 763.490.417,- (10,29%).
- **Urusan Transmigrasi**
Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total Anggaran pada Tahun 2024 sejumlah Rp 35.000.000,- terealisasi Rp 9.830.000,- (28,09%) belum terserap Rp 25.170.000,- (71,91%).

Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran.

- **Urusan Ketenagakerjaan**
Urusan Ketenagakerjaan terdiri dari 5 Program, 17 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan total Anggaran pada Tahun 2025 sejumlah Rp 9.923.661.822,- sampai dengan Tribulan I terealisasi Rp 1.332.162.506 (13,42%), belum terserap Rp 8.591.499.316,- (86,58%), penyerapan anggaran disesuaikan dengan cash budget.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD
dan Capaian Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Ketenagakerjaan	9.923.661.822	1.332.162.506	13,42
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.774.128.822	1.330.821.509	23,05
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.571.500	-	0,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.420.000	-	0,00
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.823.900	-	0,00
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.327.600	-	0,00
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.747.730.420	1.088.525.272	22,93
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.727.730.420	1.088.525.272	23,02
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	-	0
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	-	0
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	-	0,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-	0,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.145.200	-	0,00
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13.426.200	-	0,00
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.284.000	-	0,00
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.505.000	-	0,00
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	-	0,00
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.930.000	-	0,00
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.443.600	-	0,00
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.329.200	-	0,00
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.114.400	-	0,00
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.733.002	242.296.237	29,63
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.213.790	62.408.112	20,38
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.999.000	-	0,00
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.520.212	179.888.125	37,36
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.505.100	-	0,00
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.997.100	-	0,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.508.000	-	0,00
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	-	0,00
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	7.380.500	-	0,00
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	7.380.500	-	0,00
2.07.02.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	7.380.500	-	0,00
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.061.738.700	-	0,00
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.026.691.400	-	0,00
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.020.000.000	-	0,00
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	6.691.400	-	0,00
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.030.300	-	0,00
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.030.300	-	0,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	11.883.000	-	0,00
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	11.883.000	-	0,00
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15.134.000	-	0,00
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.134.000	-	0,00
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	211.142.200	1.340.997	0,64
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	35.440.200	-	0,00
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	16.768.000	-	0,00
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	7.197.500	-	0,00
2.07.04.2.01.05	Perluasan kesempatan kerja	11.474.700	-	0,00
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	117.754.800	-	0,00
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online	50.000.000	-	0,00
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.754.800	-	0,00
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	50.000.000	-	0,00
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	57.947.200	1.340.997	2,31
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	17.026.900	-	0,00
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	15.992.000	1.340.997	8,39
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	24.928.300	-	0,00
2.07.05	Program Hubungan Industrial	2.869.271.600	-	0,00
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.826.036.400	-	0,00
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2.826.036.400	-	0,00
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	43.235.200	-	0,00
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	43.235.200	-	0,00

Urusan Transmigrasi Regional

- Urusan Transmigrasi
 Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total Anggaran pada Tahun 2025 sejumlah Rp 25.030.900,- sampai dengan Tribulan I terealisasi Rp 0,- (0%), belum terserap Rp 25.030.900 (100%), penyerapan anggaran disesuaikan dengan cash budget.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	25.030.900	0	0,00
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.030.900	0	0,00
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.807.800	0	0,00
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	6.223.100	0	0,00

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

NAMA PD : DINAS TENAGA KERJA KAB. LAMONGAN

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
								5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%			
	1	2					3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
1	2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM Internal Disnaker	81	5.794.074.990	87,63	5.086.149.883	82	5.774.128.822	-	1.330.821.509		23,05	87,63	6.416.971.392	108,19	110,75	DINAS TENAGA KERJA KAB. LAMONG AN	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	22 dokume n	40.000.000	22 dokume n	39.610.000	22 dokume n	28.571.500	6 dokume n	-	27,27	0,00	28 dokume n	39.610.000	127,27	99,03		
	2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokume n	10.000.000	4 dokume n	9.610.000	4 dokume n	6.420.000	2 dokume n	-	50,00	0	6 dokume n	9.610.000	150	96,10		
	2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	10.000.000	4 laporan	10.000.000	4 Laporan	7.823.900	1 Lapora n	-	25,00	0	5 Laporan	10.000.000	125	100,00		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	14.327.600	3 Lapora n	-	75,00	0	7 Laporan	20.000.000	175	100,00		
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administarsi Keuangan Daerah	100%	4.385.600.000	100%	3.786.199.030	100%	4.747.730.420	25%	1.088.525.272	25%	22,93	125%	4.874.724.302	125	111,15		
	2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	4.365.600.000	30 orang	3.766.199.030	30 orang	4.727.730.420	30 orang	1.088.525.272	100	23,02	30 orang	4.854.724.302	100	111,20		
	2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	10.000.000	3 laporan	10.000.000	3 laporan	10.000.000	-	-	-	0,00	3 laporan	10.000.000	100	100,00		
	2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3 laporan	10.000.000	3 laporan	10.000.000	3 laporan	10.000.000	-	-	-	0,00	3 laporan	10.000.000	100	100,00		
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15.000.400	100%	14.980.000	100%	15.000.000	25%	-	25,00	0,00	125%	14.980.000	125	99,86		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	15.000.400	25 orang	14.980.000	25 orang	15.000.000	-	-	-	0,00	25 orang	14.980.000	100	99,86		
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	88.002.700	100%	78.018.200	100%	65.145.200	25%	-	25,00	0,00	125%	78.018.200	125	88,65		
	2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	9.992.400	17 paket	9.978.200	17 paket	13.426.200	-	-	-	0,00	17 paket	9.978.200	100	99,86		
	2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 paket	24.000.000	25 paket	23.924.700	25 paket	15.284.000	-	-	-	0,00	25 paket	23.924.700	100	99,69		
	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	9.010.300	5 paket	9.010.300	5 paket	4.505.000	-	-	-	0,00	5 paket	9.010.300	100	100,00		
	2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokume n	15.000.000	2 dokume n	10.620.000	2 dokume n	15.000.000	-	-	-	0,00	2 dokume n	10.620.000	100	70,80		
	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	30.000.000	18 laporan	24.485.000	20 laporan	16.930.000	-	-	-	0,00	18 laporan	24.485.000	90	81,62		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
								5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%			
	1	2						3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.000.000	100%	19.465.000	100%	12.443.600	25%	-	25,00	0,00	125%	19.465.000	125	97,33		
	2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	10.000.000	5 unit	9.585.000	2 unit	4.329.200	-	-	-	0,00	5 unit	9.585.000	100	95,85		
	2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	10.000.000	2 unit	9.880.000	3 unit	8.114.400	-	-	-	0,00	2 unit	9.880.000	100	98,80		
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.150.476.790	100%	1.070.821.153	100%	817.733.002	25%	242.296.237	25,00	29,63	125%	1.313.117.390	125	114,14		
	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	298.713.790	3 laporan	251.606.397	3 laporan	306.213.790	3 laporan	62.408.112	100	20,38	6 laporan	314.014.509	200	105,12		
	2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 laporan	29.999.000	53 laporan	21.704.000	60 laporan	29.999.000	-	-	-	0,00	53 laporan	21.704.000	88,33	72,35		
	2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	821.764.000	14 laporan	797.510.756	14 laporan	481.520.212	4 laporan	179.888.125	28,57	37,36	18 laporan	977.398.881	128,57	118,94		

N o	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2							3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8			
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	94.995.100	100%	77.056.500	100%	87.505.100	25%	-	25,00	0,00	125%	77.056.500	125	81,12		
	2	07	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	49.997.100	2 unit	45.010.200	2 unit	49.997.100	-	-	-	0,00	2 unit	45.010.200	100	90,03		
	2	07	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	19.998.000	14 unit	7.326.300	14 unit	12.508.000	-	-	-	0,00	14 unit	7.326.300	100	36,64		
	2	07	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	25.000.000	1 unit	24.720.000	1 unit	25.000.000	-	-	-	0,00	1 unit	24.720.000	100	98,88		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	88,88%	10.000.000	87,70%	10.000.000	88,89%	7.380.500	-	-	-	0,00	87,70%	10.000.000	98,67	100,00		
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokume n	10.000.000	1 Dokume n	10.000.000	1 Dokume n	7.380.500	-	-	-	0,00	1 Dokume n	10.000.000	100	100,00		
	2	07	02	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 orang	10.000.000	25 orang	10.000.000	25 orang	7.380.500	-	-	-	0,00	25 orang	10.000.000	100	100,00		
	2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,37%	1.274.999.778	3,17%	1.250.497.365	1,38%	1.061.738.700	-	-	-	0,00	3,17%	1.250.497.365	231,39	98,08		
							Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja	45,60%		40,62%		46,96%		-		-		40,62%		89,08			
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	224 orang	1.229.999.778	288 orang	1.206.388.165	224 orang	1.026.691.400	-	-	-	0,00	288 orang	1.206.388.165	128,57	98,08		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 orang	1.200.000.000	160 orang	1.182.561.465	160 orang	1.020.000.000	-	-	-	0,00	160 orang	1.182.561.465	100	98,55		
	2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	3 unit	29.999.778	3 unit	23.826.700	2 unit	6.691.400	-	-	-	0,00	3 unit	23.826.700	100	79,42		
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	45 LPK	10.000.000	2 LPK	9.870.000	45 LPK	8.030.300	-	-	-	0,00	2 LPK	9.870.000	4,44	98,70		
	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	31 Lembaga	10.000.000	31 Lembaga	9.870.000	31 Lembaga	8.030.300	-	-	-	0,00	31 Lembaga	9.870.000	100	98,70		
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 orang	15.000.000	10 orang	14.293.000	10 orang	11.883.000	-	-	-	0,00	10 orang	14.293.000	100	95,29		
	2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	15.000.000	10 Perusahaan	14.293.000	10 Perusahaan	11.883.000	-	-	-	0,00	10 Perusahaan	14.293.000	100	95,29		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	7 perus ahaan kecil	20.000.000	7 perus ahaan kecil	19.946.200	7 perus ahaan kecil	15.134.000	-	-	-	0,00	7 perus ahaan kecil	19.946.200	100	99,73		
	2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokume n	20.000.000	1 Dokume n	19.946.200	1 Dokume n	15.134.000	-	-	-	0,00	1 Dokume n	19.946.200	100	99,73		
	2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	74,05%	255.000.000	75,15%	249.661.103	75,05%	211.142.200	-	1.340.997	-	0,64	75,15%	251.002.100	101,49	98,43		
	2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	2 pelayan an	50.000.000	2 pelayan an	48.301.700	2 pelayan an	35.440.200	2 pelayan an	-	100	0,00	2 pelayan an	48.301.700	100	96,60		
	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 Orang	25.000.000	1.848 orang	24.631.700	75 Orang	16.768.000	-	-	-	0,00	1.848 orang	24.631.700	2.464	98,53		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	10.000.000	15 Orang	10.000.000	15 Orang	7.197.500	-	-	-	0,00	15 Orang	10.000.000	100	100,00		
	2	07	04	2.01	05	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	15.000.000	20 orang	13.670.000	20 orang	11.474.700	-	-	-	0,00	20 orang	13.670.000	100	91,13		
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 pencak er	135.000.000	2.459 pencak er	134.453.450	1.000 pencak er	117.754.800	194 pencak er	-	19,40	0,00	2.653 pencak er	134.453.450	265,30	99,60		
	2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokume n	60.000.000	1 Dokume n	59.750.000	1 Dokume n	50.000.000	-	-	-	0,00	1 Dokume n	59.750.000	100	99,58		
	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25 orang	25.000.000	25 orang	24.903.450	25 orang	17.754.800	-	-	-	0,00	25 orang	24.903.450	100	99,61		
	2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1.000 pencak er	50.000.000	1.179 Orang	49.800.000	1.000 pencak er	50.000.000	-	-	-	0,00	1.179 Orang	49.800.000	117,90	99,60		

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	110 orang	70.000.000	534 orang	66.905.953	110 orang	57.947.200	68 Orang	1.340.997	61,82	2,31	602 orang	68.246.950	547,27	97,50		
	2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	20.000.000	20 orang	19.160.000	20 orang	17.026.900	2 orang	-	10,00	0,00	22 orang	19.160.000	110	95,80		
	2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	20 Orang	20.000.000	493 orang	19.185.953	20 Orang	15.992.000	66 Orang	1.340.997	330	8,39	559 orang	20.526.950	2.795	102,63		
	2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 Orang	30.000.000	20 Orang	28.560.000	20 Orang	24.928.300	-	-	-	0,00	20 Orang	28.560.000	100	95,20		
	2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,09%	85.000.000	65,65%	59.276.000	60,10%	2.869.271.600	-	-	-	0,00	65,65%	59.276.000	109,25	69,74		

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8		11 = 10/5x100%		12	13
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	15.000.000	30 perusahaan	15.000.000	30 perusahaan	2.826.036.400	-	-	-	0,00	30 perusahaan	15.000.000	100	100,00		
		2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	50 Laporan	15.000.000	50 laporan	15.000.000	1 Laporan	2.826.036.400	-	-	-	0,00	50 laporan	15.000.000	100	100,00		
		2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	70.000.000	4 Perselisihan Kerja	44.276.000	10 Perselisihan Kerja	43.235.200	1 Perselisihan Kerja	-	10,00	0,00	4 Perselisihan Kerja	44.276.000	40,00	63,25		

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s.d Trb 1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	Ke ter an ga n
	1	2						3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100%		10 = 6+8			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembag a	70.000.000	1 Lembag a	44.276.000	1 Lembag a	43.235.200	-	-	-		1 Lembag a	44.276.000	100	63,25		
	3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,74%	35.000.000	67,19%	9.830.000	64,75%	25.030.900	-	-	-	0,00	67,19%	9.830.000	103,78	28,09		
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	10 KK	35.000.000	-	9.830.000	10 KK	25.030.900	-	-	-	0,00	-	9.830.000	0	28,09		
	3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK	25.000.000	-	1.060.000	5 KK	18.807.800	-	-	-	0,00	-	1.060.000	0	4,24		
	3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	10.000.000	20 KK	8.770.000	20 KK	6.223.100	-	-	-	0,00	20 KK	8.770.000	100	87,70		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR KINERJA	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentasi Akurasi Proyeksi Indikator Dalam Rencana Tenaga Kerja			88,86%	88,87%	88,88%	88,89%	88,89%	87,70%	88,89%	88,90%	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			1,35%	1,36%	1,37%	1,38%	2,50%	3,17%	1,38%	1,39%	
3	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja			42,978%	44,267%	45,595%	46,963%	39,35%	40,62%	46,963%	48,372%	
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten			72,30%	73,21%	74,05%	75,05%	74,52%	75,15%	75,05%	76,08%	
5	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan			60,07%	60,08%	60,09%	60,10%	65,59%	65,65%	60,10%	60,11%	
6	Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya			64,72%	64,73%	64,74%	64,75%	67,19%	67,19%	64,75%	64,76%	
7	Indeks Kepuasan Masyarakat			79	80	81	82	87,61	87,63	82	83	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Kondisi Ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja adalah masih tingginya angka pengangguran terbuka setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal, disamping itu pembukaan lapangan kerja baru disektor swasta belum mampu menyerap tenaga kerja lokal, karena rendahnya kualitas SDM dan banyaknya lulusan SMA/SMK maupun Perguruan Tinggi, sehingga pencari kerja belum mampu terserap dipasar lokal maupun nasional.

Disamping masalah pengangguran, masalah lainnya yang dihadapi adalah tidak adanya pegawai pengawas ketenagakerjaan tingkat Kabupaten, karena sudah ditarik menjadi pegawai provinsi.

Dibidang ketrasmigrasian permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya keseimbangan antara masyarakat yang mendaftar sebagai transmigran dengan calon transmigran yang diberangkatkan, karena pemberangkatan calon transmigran tergantung kuota yang telah ditentukan oleh pusat.

Disamping permasalahan utama di atas permasalahan lainnya yang dihadapi yaitu minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi, kondisi sarana dan prasarana pemukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi, hal ini disebabkan belum optimalnya hubungan disektor terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Sekretariat.

Dinas Tenaga Kerja sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Akan tetapi dalam perubahan Renja ini tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL		NIHIL		
Jumlah					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi

1. Ketenagakerjaan.

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
Nasional			
1.	Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Kemennaker	
Provinsi			
1.	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	

Arah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah pusat guna Identifikasi dan memilih sektor / sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan Tenaga Kerja tinggi, sehingga menjadi fokus untuk dikembangkan melalui :

- a. Perluasan skala ekonomi ke arah sektor / sub sektor yang produktivitasnya tinggi juga diperlukan untuk menyediakan lapangan kerja yang besar mengantisipasi berlangsungnya bonus demografi;
- b. Realokasi tenaga kerja ke sektor /sub sektor tertentu, memudahkan pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi;
- c. Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan menjadi dasar penyusunan program pelatihan : kurikulum / bahan ajar, penyiapan tenaga instruktur dan asesor serta prasarana pendukung program pelatihan;
- d. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang belum dapat direalisasikan;
- e. Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan;
- f. Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (*regional competency standard framework*);
- g. Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan penerapan KKNi;

Adapun kebijakan yang digunakan oleh Provinsi Jawa Timur guna memperkuat ketenagakerjaan yaitu:

- 1) Peningkatan ketrampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja berkompeten melalui:
 - a. Penguatan daya saing penduduk usia kerja melalui Penguatan UPT pelatihan kerja sebagai lembaga strategis untuk membekali kompetensi dan membangun keunggulan kompetensi;

- b. Menggerakkan dan melakukan pendampingan alumni UPT pelatihan kerja melalui peran UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (UPT PPTK);
 - c. Membangun jaring pengaman TPT melalui program alih kerja (PAKER) atau alih profesi bagi pekerja ter-PHK agar tidak menambah angka penganggur;
- 2) Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor informal dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri melalui:
- a. Optimalisasi penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui program Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
 - b. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
 - c. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
 - d. Pemberdayaan tenaga kerja pendamping dan penggerak masyarakat untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat di sektor informal
- 3) Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan di sektor informal produktif dan remuneratif melalui :
- a. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
 - b. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
 - c. Pemberdayaan tenaga kerja pendamping dan penggerak masyarakat untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat di sektor informal;
- 4) Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis melalui :
- a. Meningkatkan suasana ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial, peran pengawas ketenagakerjaan, dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. Melaksanakan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder, terutama Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB);
- 5) Pembinaan dan penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi dalam rangka mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan berkualitas melalui:
- Meningkatkan koordinasi lintas Provinsi dan Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menambah kuota calon transmigran yang jumlah peminatnya cukup tinggi;

Permasalahan ketenagakerjaan secara umum masih ditandai dengan rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi pendidikan formal maupun ketrampilannya. Hal ini mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi rendah.

Disisi lain, tuntutan pasar kerja dan persaingan industri di pasar global membutuhkan kemampuan tenaga kerja yang tinggi, dimana penggunaan teknologi dan informasi pada sebagian besar industri menuntut kebutuhan tenaga kerja profesional yang memenuhi standar kualifikasi tenaga kerja berbasis Knowledge, Skill dan Attitude (KSA), serta sosial skill (ketrampilan sosial). Pasar kerja di masa datang juga menuntut adanya jaminan kondisi iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan harmonis yang dapat melahirkan suasana hubungan industri yang ramah dan adanya kepastian hukum dalam usaha dan investasi.

Isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan lainnya antara lain, terbatasnya kesempatan kerja, kemampuan atau skill tenaga kerja yang tidak memadai, kurang modal dan sarana pemasaran untuk industri rumah tangga serta masih kurangnya investasi di Lamongan.

2. Ketramigrasian

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga bagi setiap bangsa negara dan daerah, bidang transmigrasi dalam hal ini sebagai salah satu jenis mobilitas penduduk diharapkan dapat menjadi salah satu usaha untuk mempererat hubungan antar suku bangsa dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks mobilitas penduduk melalui transmigrasi ini tidak lepas akan melibatkan dua pemerintah daerah yang saling kerja sama, mengingat tingginya minat / animo masyarakat untuk bertransmigrasi dengan mekanisme dan prosedur kerja sama.

3.2 Perubahan Tujuan Dan Sasaran PD Tahun 2025

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini.

Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJPD periode ke 4 Tahun 2025-2029 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yakni:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan Lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi berbasis potensi unggulan, sehingga terwujudnya kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkelanjutan** menegaskan pentingnya kesinambungan pembangunan yang adil dan merata, tanpa mengabaikan lingkungan hidup serta harmoni sosial.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, "**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan**" ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi 1

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Fokus dari Misi pertama yakni terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan.

Misi 2

Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan adaptif terhadap perubahan zaman

Misi ke dua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga.

Misi 3

Mewujudkan Infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan

Fokus Misi tiga yakni Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektivitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana.

Misi 4

Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan

Fokus Misi ke empat yaitu Peningkatan Kesalehan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai Kebudayaan bagi Masyarakat. Reppresentasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Misi 5

Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif

Fokus misi ke lima adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang didukung oleh peningkatan inovasi layanan berbasis digital, profesionalitas aparatur, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan desa mandiri.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi sektor unggulan.

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan.

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator : Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan mengacu kepada sasaran tersebut di atas yaitu :

Tujuan : Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sasaran : Meningkatnya Penduduk yang Bekerja.

Indikator : Persentase Peningkatan Penduduk yang Bekerja.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang Tenaga Kerja mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Nilai IKM Internal DISNAKER**.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja**
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, Tingkat produktifitas tenaga kerja**.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota**.
5. Program Hubungan Industrial tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan**
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; tolak ukur dan hasil program ini adalah **Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya**.

Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2025-2029) dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehubungan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan merencanakan 6 (sepuluh) Program yang berkaitan dengan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Dari Program tersebut diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - a. Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 3) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
 - 4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelayanan antar Kerja
- b. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- c. Perluasan Kesempatan Kerja

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online
- b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- c. Job Fair/Bursa Kerja

3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5. Program Hubungan Industrial

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyuluhan Transmigrasi

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.1
PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PD DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2025

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Disnaker	82	5.774.128.822	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Disnaker	82	5.895.574.078	121.445.256		DINAS TENAGA KERJA KAB. LAMONGAN
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	22 dokumen	28.571.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	22 dokumen	28.571.500	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.420.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.420.000	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	7.823.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	7.823.900	-		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.327.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.327.600	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.747.730.420	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah	100%	4.860.791.999	113.061.579		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	4.727.730.420	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	4.840.791.999	113.061.579		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	10.000.000	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	10.000.000	-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25.426.600	10.426.600		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 orang	25.426.600	10.426.600		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	65.145.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	64.350.200	(795.000)		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	13.426.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	13.426.200	-		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 paket	15.284.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 paket	15.284.000	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	4.505.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	4.505.000	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	15.000.000	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	16.930.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	16.135.000	(7955.000)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	12.443.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	12.443.600	-		
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	4.329.200	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	4.329.200	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	8.114.400	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	8.114.400	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	817.733.002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	818.176.279	443.277		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	306.213.790	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	278.979.467	(27.234.323)		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 laporan	29.999.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 laporan	29.999.000	-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	481.520.212	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	517.138.212	35.618.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	87.505.100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	85.813.900	(1.691.200)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	49.997.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	54.190.700	4.193.600		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	12.508.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	14 unit	6.623.200	(5.884.800)		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	25.000.000	-		
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	88,89%	7.380.500	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	88,89%	7.380.500	-		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	7.380.500	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	7.380.500	-		
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 orang	7.380.500	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 orang	7.380.500	-		
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,38%	1.061.738.700	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,38%	1.291.738.700	230.000.000		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja	46,96%			Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja	46,96%		-		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	224 orang	1.026.691.400	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi	224 orang	1.256.691.400	230.000.000		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 orang	1.020.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 orang	1.250.000.000	230.000.000		
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	2 unit	6.691.400	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	2 unit	6.691.400	-		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	45 LPK	8.030.300	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang terakredetasi	45 LPK	8.030.300	-		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	31 Lembaga	8.030.300	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	31 Lembaga	8.030.300	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 orang	11.883.000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah produktivitas SDM perusahaan yang meningkat	10 orang	11.883.000	-		
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	11.883.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	11.883.000	-		
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	7 perusahaan kecil	15.134.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	7 perusahaan kecil	15.134.000	-		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	15.134.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	15.134.000	-		
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	75,05%	211.142.200	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	75,05%	221.142.200	10.000.000		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	2 pelayanan	35.440.200	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja	2 pelayanan	35.440.200	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 Orang	16.768.000	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	75 Orang	16.768.000	-		
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	7.197.500	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	15 Orang	7.197.500	-		
	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	11.474.700	Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	20 orang	11.474.700	-		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 pencaker	117.754.800	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja	1.000 pencaker	117.754.800	-		
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar kerja online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000	-		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25 orang	17.754.800	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	25 orang	17.754.800	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1.000 pencaker	50.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1.000 pencaker	50.000.000	-		
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	110 orang	57.947.200	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI dan PMI Purna yang dilindungi	110 orang	67.947.200	10.000.000		
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	17.026.900	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 orang	17.026.900	-		
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	20 Orang	15.992.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang ditangani	20 Orang	25.992.000	10.000.000		
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 Orang	24.928.300	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 Orang	24.928.300	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,10%	2.869.271.600	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan UU Bidang Ketenagakerjaan	60,10%	3.973.901.766	1.104.630.166		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	2.826.036.400	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UU bidang ketenagakerjaan	30 perusahaan	3.930.666.566	1.104.630.166		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	1 Laporan	2.826.036.400	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB), Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	1 Laporan	3.930.666.566	1.104.630.166		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	43.235.200	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian perselisihan kerja	10 Perselisihan Kerja	43.235.200	-		
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	43.235.200	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	43.235.200	-		
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,75%	25.030.900	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya	64,75%	25.030.900	-		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	10 KK	25.030.900	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah calon transmigran yang ditempatkan	10 KK	25.030.900	-		

No	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PAGU PROGRAM	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)	ALASAN PERUBAHAN	PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNG JAWAB
	URUSAN/PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK	18.807.800	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	5 KK	18.807.800	-		
	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	6.223.100	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan penyuluhan	20 KK	6.223.100	-		
JUMLAH				9.948.692.722				11.414.768.144	1.466.075.422		

Lamongan, 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN


M. ZAMRONI, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Reviu Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan.

4.2 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan program dan kegiatan target kinerja RENSTRA 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan sebagian masih belum tercapai;
- b. Fasilitas Prasarana dan Pelatihan masih belum lengkap;
- c. Fasilitas Informasi Pasar Kerja dan kesempatan kerja masih belum memadai, khususnya Mobil Operasional IPK
- d. Keterbatasan dukungan dana dalam bidang Pelatihan.
- e. Belum adanya Instruktur yang tetap pada BLK Kab. Lamongan.
- f. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya mendaftarkan Karyawannya ikut BPJS Ketenagakerjaan.
- g. Perusahaan belum melaporkan secara rutin jumlah Pencari Kerja (Pencaker) kepada Dinas Tenaga Kerja.
- h. Masih rendahnya kualitas Tenaga Kerja di Lamongan.

4.3 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Reviu Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mandiri, berdaya saing, harmonis, dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Perubahan Renja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - c. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang. Berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, agar di tahun mendatang peningkatan kinerja lebih meningkat lagi capaiannya, guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan dan dianggarkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2021 - 2026), disarankan perencanaannya lebih dimantapkan sehingga dapat terlaksana dengan baik dan diharapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan lebih memperhatikan alokasi anggaran Ketenagakerjaan dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan mengurangi Kemiskinan.

Lamongan, 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**



M. ZAMRONI, S. Sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730707 199303 1 010